

Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya

Rikhi Nelson Hiwy¹⁾, Nihayatus Sholichah²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : rikhihiwy@gmail.com

ABSTRAK

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan penduduk miskin adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih dan sanitasi, serta hak pemenuhan atas perumahan. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia. Evaluasi pembangunan perlu dilakukan agar dapat mengukur kinerja pemerintah dalam berbagai level di dalam bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Evaluasi bertujuan untuk membuat plan dan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya dan juga mengetahui faktor pendukung serta penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Menganalisa bagaimana evaluasi program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dengan menggunakan teori evaluasi (William Dunn dalam Subarsono, 2011). Hasil Penelitian ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap program Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu dilihat dari epektifitas kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan program. Selanjutnya kesimpulan penelitan ini adalah program telah berjalan sesuai dan sesuai target, di sisi lain program rumah bagi masyarakat kurag mampu memberikan dampak yang baik pula terhadap masyarakat Desa Lelang, keterlibatan berbagai *stakeholder* pemerintah desa sangat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan program, ketepatan program sangat dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkan program yang merupakan masyarakat kurang mampu. Saran dan masukan dalam penelitian ini adalah penentuan skala prioritas keluarga kurang mampu yang mendapatkan bantuan, partisipasi masyarakat desa terhadap program perlu ditingkatkan agar tercipta semangat gotongroyong, disisi lain perlu adanya pengawasan yang baik terhadap implementasi program serta serta pekerja yang terlibat dalam pengerjaan rumah bagi masyarakat kurang mampu agar tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya di tahun-tahun berikutnya.

Kata kunci: Evaluasi, Masyarakat Miskin, Perumahan, Permukiman

Abstract

Efforts made to overcome the problem of the poor are the fulfillment of the basic rights of the population such as fulfillment of food, health services, education services, employment and business, clean water and sanitation, and the fulfillment of the right to housing. Housing is one of the needs that is difficult to reach by the poor in Indonesia. Development evaluation needs to be carried out in order to be able to measure government performance at various levels in the fields according to the main tasks and functions. Evaluation aims to make short-term, medium-term and long-term plans and plans. The purpose of this study was to find out the evaluation of the construction of livable houses for the underprivileged in Lelang Village, Southwest Maluku Regency and also to find out the supporting and inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative using interview techniques, documentation, and literature studies. Analyzing how to evaluate the program for the construction of livable houses for the underprivileged in Lelang Village, Southwest Maluku Regency, Maluku Province using evaluation theory (William Dunn in Subarsono, 2011). The results of this study show that people's satisfaction with the Livable Homes program for underprivileged communities can be seen from the effectiveness of the adequacy, equity, responsiveness and accuracy of the program. Furthermore, the conclusion of this research is that the program has been running according to and

on target, on the other hand the housing program for underprivileged communities has also been able to have a good impact on the Lelang Village community, the involvement of various village government stakeholders has had a very positive impact on program sustainability, the program's accuracy has been felt by the people who get the program are underprivileged people. Suggestions and input in this study are to determine the priority scale of underprivileged families who receive assistance, the participation of village communities in the program needs to be increased so that a spirit of mutual cooperation is created, on the other hand there needs to be good supervision of program implementation as well as workers involved in building houses for underprivileged communities. able so as not to interfere with the implementation of the program for the construction of livable houses for the underprivileged in Lelang Village, Southwest Maluku Regency in the following years.

Keywords: Evaluation, Poor People, Housing, Settlement

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat–nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa–kelurahan, kecamatan, kabupaten–kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global–internasional pembangunan antar negara bangsa. Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi

disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat.

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional (Sondang P. Siagian, 2005).

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (Sondang P. Siagian, 2012). Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang

akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada (Rustam, 2010). Selain pertumbuhan ekonomi salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi adalah seberapa besar efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia (Yacoub, 2012).

Kemiskinan sendiri pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al., 2016). Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Christianto, 2013). Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian. Pratama (2014) mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun, masih mengalami masalah kemiskinan sebesar 24% jika angka kemiskinan di bawah 1\$US dari 240 juta jiwa. Namun, jika angka kemiskinan menggunakan standart hidup dibawah 2\$ maka angka kemiskinan tersebut melonjak menjadi 35%. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dirasmah kurang efektif dalam menangani masalah kemiskinan yang ada. Hal tersebut terlihat dalam laporan BPS pada bulan september 2016 bahwa presentase penduduk miskin perkotaan turun dari 7,79% menjadi 7,73% sementara pada daerah perdesaan turun dari 14,11% menjadi 13,96%. Namun meskipun demikian jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0.15 juta orang. Selain itu

masih adanya provinsi yang memiliki presentase kemiskinan diatas presentase nasional. Hal tersebut menandakan bahwa masih adanya angka kemiskinan yang tinggi yang terjadi pada daerah provinsi yang ada di Indonesia. Masih adanya tingkat kemiskinan yang terjadi pada daerah Indonesia, maka dari itu penulis ingin meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dengan studi pada 33 provinsi kurun waktu 2011-2015.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, serta garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang didefinisikan oleh Carl J Federick sebagaimana dikutip juga oleh Leo Agustino (2008). Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pendapat ini juga mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang

perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus. Misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Menurut Budi Winarno (2007). Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan *grand design* (Suharno, 2009).

Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010). *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan.

Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Anderson menawarkan konsep kebijakan dan menurut Budi Winarno (2007) memusatkan lebih tepat perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga pula membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri dikutip oleh Budi Winarno (2007). Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Adapun berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1)

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; dan 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government chooseto do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

3. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut

William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) adalah sebagai berikut :

a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives or policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun

agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

4. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Perbaikan atau penyempurnaan di

masa mendatang atas suatu program. Dalam hal ini, misi dari evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000). Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.

Selain itu menurut Jones, evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi 24 kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk rekomendasi (Jones, 1994). Serta Weiss (dalam Jones, 1994) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata 24 kriteria yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan 24 kriteria. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai serta dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang.

Selanjutnya, James Anderson dalam Winarno (2008) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut :

a) Tipe Pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b) Tipe Kedua



Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c) Tipe Ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan.

Dimensi-dimensi tersebut meliputi lima hal, diantaranya :

- a) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- d) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- e) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Ada tiga hal kebijakan-kebijakan evaluasi yang harus diperhatikan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, diantaranya yaitu :

- a) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang

kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.

- b) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
- c) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

Selanjutnya, menurut Samudra dalam Nugroho (2003), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

a) Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang

mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

b) Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan

c) Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

d) Accounting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya, William Dunn (dalam House, 1978), mengemukakan beberapa Model Evaluasi Kebijakan Publik yang terdiri dari :

a) The Adversary Model

Para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.

b) The Transaction Model

Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dua jenis, yaitu :

1) Evaluasi responsif yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan secara informal, berulang-ulang agar program yang telah direncanakan dapat digambarkan dengan akurat.

2) Evaluasi iluminatif (*illuminative evaluation*) bertujuan untuk mengkaji program novatif dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha mengungkapkan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.

c) Good Free Model

Model evaluasi ini bertujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas.

5. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan: penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa kedua aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluatif.

Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designatif (faktual) ketimbang tuntutan evaluatif. Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan, menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan, diantaranya evaluasi

semu, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis keputusan.

a) Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi-semu analisis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuisioner, random sampling, dan teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses. Namun setiap hasil kebijakan yang ada (misalnya, jumlah lulusan pelatihan yang diperkerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat.

Bentuk-bentuk utama dari evaluasi semu mencakup berbagai pendekatan untuk pemantauan, diantaranya eksperimentasi sosial, akuntansi sistem sosial, pemeriksaan sosial, dan sistesis penelitian dan praktik.

b) Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target

diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik : untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan.

Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi. Salah satu tipe utama evaluasi formal adalah evaluasi sumatif yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu.

Evaluasi sumatif diciptakan untuk menilai produk-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantap. Sebaliknya, evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target 9 formal. Perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif tidak seharusnya dilebih-lebihkan meskipun demikian karena perbedaan utama dari karakteristik evaluasi formatif adalah jumlah titik waktu di mana hasil kebijakan dipantau. Karena itu, perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif adalah persoalan derajat. Evaluasi formal dapat bersifat sumatif dan formatif, tetapi mereka juga dapat meliputi kontrol langsung atau

tidak langsung terhadap masukan kebijakan dan proses-proses.

Dalam kasus pertama, evaluator dapat memanipulasi secara langsung tingkat pengeluaran, campuran program, atau karakteristik kelompok sasaran. Artinya evaluasi dapat mempunyai satu atau lebih karakteristik eksperimentasi sosial sebagai pendekatan terhadap pemantauan.

Dalam kasus kontrol yang bersifat tidak langsung, masukan dan proses kebijakan tidak dapat secara langsung dimanipulasi. Sebaliknya masukan dan proses tersebut harus dianalisis secara retrospektif berdasarkan pada aksi-aksi yang telah dilakukan. Empat tipe evaluasi formal masing-masing didasarkan pada orientasi yang berbeda terhadap proses kebijakan (sumatif lawan formatif) dan tipe kontrol terhadap aksi (langsung lawan tidak langsung).

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada *qualitative research*. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, suatu organisasi atau komunitas dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Sebagaimana dinyatakan oleh Lincoln & Guba (1989) bahwa penelitian kualitatif memang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif, karena jenis dan desain penelitian pada pendekatan naturalistik yang pada umumnya relatif lebih leluasa dalam menjangkau dan menetapkan variabel-variabel penelitian.

Selanjutnya, secara tegas Lofland & Lofland (1984) menyatakan bahwa “...*qualitative research seeks depth rather than breadth. Instead of drawing from a*

large, representative sample of an entire population of interest, qualitative researchers seeks to acquire indepth and an intimate information about a smaller group of persons...”.

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Parsudi Suparlan, (1994) dalam buku metode penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif biasanya dikaitkan dengan pengertian yang sama dengan pendekatan yang dalam antropologi dikenal dengan *holistic*. Dalam pendekatan tersebut tidak dikenal adanya sampel, tetapi penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, yakni penelitian yang diorientasikan untuk menguraikan data dan/atau informasi yang dapat dikumpulkan di lapangan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data untuk kajian ini dilaksanakan melalui :

a) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para informan dan informan kunci, khususnya mereka yang terlibat dalam kegiatan penanganan pengungsi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan kedalaman penggalian data, terutama data kualitatif primer dan sekunder (dokumen) sebagai tindak lanjut (penelusuran) dari data primer yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan.

b) *Focus Group Discussion* atau FGD

FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan

tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Sesuai namanya, pengertian *Focus Group Discussion* mengandung tiga kata kunci, yaitu : diskusi (bukan wawancara atau obrolan), kelompok (bukan individual), dan terfokus atau terarah (bukan bebas).

FGD bukan pula sekadar kumpul-kumpul beberapa orang untuk membicarakan suatu hal. Banyak orang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta, padahal aktivitas tersebut bukanlah FGD, melainkan rapat biasa. FGD berbeda dengan arena yang semata-mata digelar untuk mencari konsensus. Sebagai alat penelitian, FGD dapat digunakan sebagai metode primer maupun sekunder. FGD sendiri merupakan sebuah kelompok diskusi yang terdiri dari 6 sampai 8 orang atau maksimal 10 orang dalam sebuah ruangan dan biasanya dengan posisi duduk melingkar.

c) Observasi

Dilakukan terhadap data dan aktivitas yang dapat diamati, baik berupa data atau aktivitas umum maupun data atau aktivitas khusus yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Penggunaan teknik ini lebih untuk melakukan verifikasi atau triangulasi atas data yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dan wawancara mendalam.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk menganalisa data yang dikumpulkan menggunakan analisa data deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang tidak mempergunakan perhitungan statistik. Arikunto (1993) menyatakan bahwa analisa data deskriptif eksploratif adalah analisa yang

digunakan untuk memperoleh suatu gambaran atau status fenomena.

Proses peneitian kualitatif berlangsung serempak dilakukan dalam bentuk pengumpulan atau pengolahan dan menginteprestasikan sejumlah data yang bersifat kualitatif. Kemudian terhadap sejumlah data tersebut, peneliti melakukan analisa kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Analisa Data Kualitatif (2009) terdiri tiga alur yaitu reduksi data, penyajian dan analisa data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi atau interpretasi. Ketiga tahap ini jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar serta merupakan proses siklus dan interaktif.

Data dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah, diantaranya kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai prosedur analisis yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada penelitian ini penulis menganalisa bagaimana evaluasi program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya memperluas layanan perumahan dan permukiman di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dengan menggunakan teori Evaluasi William Dunn dalam Subarsono 2011.

Tabel 1. Kriteria Evaluasi

No.	Kriteria	Penjelasan
-----	----------	------------



1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan membuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber : W. Dunn dalam Subarson (2011)

1. Efektivitas

Efektivitas mengandung pengertian taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, hak ditinjau dari segi hasil, maupun usaha dari segi usaha yang diukur. Berdasarkan hasil temuan di lapangan pelaksanaan program pelatihan keterampilan dapat dikatakan berhasil karena diterima cukup baik oleh masyarakatnya. Peran aktif dari masyarakat dengan adanya program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya memperluas layanan perumahan dan permukiman di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.

Berikut adalah hasil wawancara penulis kepada Kepala Desa Lelang Bapak Loth Pay :

“Apakah hasil program rumah bagi keluarga kurang mampu di Desa Lelang telah sesuai dengan harapan dan tercapai target?”

“Menurut Kepala Desa Lelang, Program rumah untuk keluarga kurang mampu di desa lelang telah berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Hal tersebut dilihat dari program kerja Desa Lelang untuk pembuatan rumah bagi masyarakat kurang mampu sejak tahun 2018-2021 target keluarga sasaran penerima manfaat rumah bagi keluarga kurang mampu adalah 20 unit

rumah”. (Wawancara tanggal 2 Februari 2022).

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa sesuai dengan program kerja Pemerintah Desa Lelang sejak Tahun 2018-2021 target keluarga sasaran penerima manfaat rumah untuk keluarga miskin telah tercapai dan berjalan sesuai harapan. Lebih lanjut penulis mewawancarai Kaur Pembangunan Desa yaitu Bapak Jefry. F. Pay.

“Apakah hasil program rumah bagi keluarga kurang mampu di Desa Lelang telah sesuai dengan harapan dan tercapai target?”

“Ya, betul adik... lihat saja, semua masyarakat senang karena ada program ini, dan saya rasa program ini sangat bermanfaat, masyarakat juga senang ada program ini, lihat saja banyak keluarga kurang mampu di katong punya kampung ini sudah dapat rumah program dari pemerintah Desa Lelang”. (Wawancara tanggal 2 Februari 2022).

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa semua masyarakat desa senang karena dari program rumah untuk keluarga miskin atau kurang mampu, program rumah untuk keluarga kurang mampu atau miskin ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Lebih lanjut penulis mewawancarai tokoh pemuda Desa Jefry Miru.

“Apakah hasil program rumah bagi keluarga kurang mampu di Desa Lelang telah sesuai dengan harapan dan tercapai target?”

“Menurut saya program ini sesuai dengan harapan kita bersama, kita ketahui sendiri bahawa belum ada program rumah untuk keluarga kurang mampu/miskin sebanyak ini dan menyentuh semua marga yang ada di desa”. (Wawancara tanggal 2 Februari 2022).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa program rumah bagi keluarga kurang mampu atau miskin di Desa Lelang telah

berjalan sesuai dengan diharapkan bersama, hal tersebut ditandai dengan semua perwakilan Marga mendapatkan bagian dalam program ini serta pemerintah desa sangat konsen terhadap program dimaksud. Lebih lanjut penulis mewawancarai keluarga penerima manfaat Bapak Daniel Miru dan Jemmy Miru.

“Apakah hasil program rumah bagi keluarga kurang mampu di Desa Lelang telah sesuai dengan harapan dan tercapai target?”

“Pertama-tama kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Lelang dan jajaran yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk program rumah bagi keluarga kurang mampu bisa berjalan dengan baik dan kami sangat merasakan manfaat dari program ini, kami semula tidak bisa membuat rumah sebaik ini, namun dengan program dari pemerintah Desa, kami bisa merasakan dampak pembangunan di Desa dengan program rumah. Saya rata program ini baik dan perlu dilanjutkan lagi ade, sambung Bapak Daniel Miru”. (Wawancara tanggal 3 Februari 2022).

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa program rumah bagi keluarga kurang mampu atau miskin sangat bermanfaat dan masyarakat sangat merasakan manfaat dari program tersebut. Program rumah untuk keluarga kurang mampu atau miskin sangat baik dan harapannya program tersebut bisa di perpanjang agar semua masyarakat merasakan dampak pembangunan di Desa Lelang tersebut.



Gambar 1. Rumah untuk Keluarga Kurang Mampu di Desa Lelang

(Sumber : Dokumentasi Desa Lelang, 2021)

2. Kecukupan

Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab persoalan yang dalam masyarakat miskin di Desa Lelang.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai Sekretaris Desa Lelang, Bapak Elkiopas Miru.

“Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah keluarga miskin atau kurang mampu yang membutuhkan hunian yang layak dan aman di Desa Lelang?”

“Hasil yang telah kami capai dalam program ini menurut saya sangat bagus, target sasaran kami dan keluarga kurang mampu dapat merasakan program ini dan juga program ini di dukung oleh semua masyarakat Desa Lelang. Semua elemen salingmembantu dalam menyukkseskan program ini”. (Wawancara tanggal 3 Februari 2022).

Wawancara di atas menunjukan bahwa program rumah untuk keluarga miskin telah berjalan sesuai dengan rencana dan program kerja di Desa, program ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat Desa. Lebih lanjut penulis mewawancarai tokoh agama Desa Lelang.

“Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah keluarga miskin atau kurang mampu yang

membutuhkan hunian yang layak dan aman di Desa Lelang?”.

“Kalau target saya pikir itu adalah domain pemerintah desa yang disesuaikan dengan porsi program kerja mereka, namun saya melihat secara umum bahwa program ini baik dan mendapat respon baik pula dari masyarakat luas, program ini juga sangat membantu warga yang ada di bawah garis kemiskinan khususnya di Desa Lelang” (Wawancara tanggal 3 Februari 2022).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk target program menjadi urusan pemerintah desa namun jika di lihat dari urgensi program, masyarakat sangat suka dan program tersebut mendapatkan respon baik dari masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Lebih lanjut penulis mewawancarai masyarakat penerima manfaat program Desa Lelang, Cici Reiwuty dan Hesti Reiwuty.

“Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah keluarga miskin atau kurang mampu yang membutuhkan hunian yang layak dan aman di Desa Lelang?”

“Pemerintah Desa telah tepat memilih dan menentukan keluarga penerima manfaat dari program ini, kami yang merupakan keluarga-keluarga kurang mampu dapat merasakan program yang baik ini apalagi kami sebagai janda yang telah di tinggal oleh suami. Kami senang dan puas dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Lelang”. (Wawancara tanggal 3 Februari 2022).

Wawancara di atas memberikan kesimpulan bahwa program rumah untuk keluarga kurang mampu atau keluarga miskin telah tepat sasaran dan tepat guna.



Gambar 2. Rumah untuk Keluarga Kurang Mampu di Desa Lelang

(Sumber : Dokumentasi Desa Lelang, 2021)

3. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. Berdasarkan data temuan di lapangan oleh peneliti terkait dengan program rumah untuk keluarga kurang mampu atau miskin di Desa Lelang sebagai berikut. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Kepala Desa Lelang, Bapak Loth Pay.

“Apakah dalam program rumah untuk keluarga kurang mampu atau miskin telah dilaksanakan secara merata oleh Pemerintah Desa?”

“Program yang kami laksanakan ini telah menyentuh semua masyarakat yang kurang mampu di Desa kami, keterwakilan semua marga telah kami fasilitasi dan yang pasti telah ada komunikasi internal antara marga yang mendapatkan bantuan disisi lain memang ada kriteria penerima manfaat program telah disepakati oleh pemerintah desa lewat tim internal yang melibatkan berbagai unsur di Desa”. (Wawancara tanggal 3 Februari 2022).

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa program yang dilaksanakan telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat penerima manfaat dan pemerintah desa juga telah melibatkan berbagai unsur masyarakat desa seperti kepala marga dan tetua adat desa.

Disisi lain, pemerintah desa juga telah membentuk tim khusus di di desa untuk menentukan kriteria bagi masyarakat

penerima manfaat program rumah untuk keluarga tdk mampu atau miskin. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Sekretaris Desa Lelang.

“Kami telah bentuk tim khusus untuk menentukan keluarga kurag mampu yang nantinya akan menerima manfaat program dan juga akan mendampingi sampai dengan program berjalan dan akan di evaluasi”. (Wawancara tanggal 3 Februari 2022).

Hasil wawancara tersebut, menegaskan bahwa program tersebut telah di rasakan manfaat secara merata oleh semua elemen masyarakat desa yang membutuhkan dan pemerintah desa membentuk tim khusus untuk mendampingi program sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi program tersebut.

Penulis juga mewawancarai masyarakat penerima manfaat program yaitu Bapak Marten Pay dan Bapak Penias Saleky.

“Apakah dalam program rumah untuk keluarga kurang mampu atau miskin telah dilaksanakan secara merata oleh Pemerintah Desa?”

“Kami pikir telah merata program dari Desa ini karena semua keterwakilan marga telah mendapatkan program, disisi lain memang yang mendapatkan program tersebut rata- rata kurang mampu dan sulit secara ekonomi, ada juga yang telah di tinggal suami atau istri”. (Wawancara tanggal 4 Februari 2022).

“Program ini sangat baik dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat miskin di Desa Lelang, saya secara pribadi sangat senang mendapatkan program ini dan berharap program ini bisa di perpanjang terus”. (Wawancara tanggal 4 Februari 2022).



Gambar 3. Rumah untuk Keluarga Kurang Mampu di Desa Lelang
(Sumber : Dokumentasi Desa Lelang, 2021)

Wawancara di atas telah mempertegas bahwa program rumah untuk keluarga kurang mampu atau miskin telah merata hal tersebut karena semua marga dilibatkan dalam penentuan keluarga penerima manfaat dan juga setiap marga ada keterwakilan, disisi lain masyarakat yang menerima program rata-rata masyarakat kurang mampu dan ekonomi lemah.

Lebih lanjut, program tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin di desa Lelang dan masyarakat penerima manfaat mengharapkan bahwa program ini dapat dilanjutkan.

4. Responsivitas

Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. Menurut William N Dunn bahwa indikator responsivitas itu dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Berikut penulis mewawancarai masyarakat penerima manfaat program Bapak Teus Lakburlawar dan Jefri P.

“Apakah hasil kebijakan membuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?”. (Wawancara oleh Bapak Teus Lakburlawar).

“Saya pribadi sangat puas dengan program ini, setelah sekian lama tidak ada yang memperhatikan kebutuhan layak huni kami, pemerintah desa bisa menjawab semua kebutuhan kami khususnya tempat tinggal

yang layak”. (Wawancara tanggal 4 Februari 2022).

Lebih lanjut menurut Bapak Jefri, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa sangat membantu kami dan kami sangat puas dengan program ini, walaupun programnya bertahap namun bisa di rasakan oleh semua masyarakat yang kurang mampu (Wawancara tanggal 4 Februari 2022) .

Wawancara di atas menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas dengan program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lelang walaupun sebagian masyarakat menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan program hal tersebut karena keterbatasan anggaran yang di miliki oleh desa. Program yang di canangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sangat membantu kami masyarakat yang kurang mampu untuk tinggal dan hidup layak di rumah layak huni. Lebih lanjut penulis mewawancarai Kepala Desa Lelang.

“Apakah hasil kebijakan membuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?”

“Dari hasil evaluasi internal, masyarakat sangat puas dengan program yang kami gagas dan lakukan di pemerintah Desa Lelang. Saya sendiri juga merasa puas jika masyarakat saya yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni bisa mendapatkan tempat yang layak dan juga program ini mewujudkan visi dan misi dari pemerintah desa yaitu mensejahterakan masyarakat desa”. (Wawancara tanggal 4 Februari 2022).

Menurut wawancara di atas bahwa masyarakat sangat merasa puas dengan program yang dibuat oleh pemerintah desa, hal tersebut karena ada evaluasi tiap tahun dari pelaksanaan program oleh pemerintah desa dan juga evaluasi tersebut terhadap bergagai program pemerintah Desa Lelang yang disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah desa.



Gambar 4. Dokumentasi Wawancara
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2022)

Lebih lanjut menurut tokoh masyarakat Desa Lelang, Bapak Yakobus.

“Program ini sangat baik dan masyarakat merasakan manfaatnya namun perlu di evaluasi secara mendalam bahwa beberapa rumah belum terselesaikan secara baik untuk program tahun 2020 dan 2021”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa program yang di lakukan oleh pemerintah Desa Lelang sangat baik namun harus di evaluasi secara mendalam karena ada beberapa rumah hasil program belum rampung pembangunannya dan perlu mendapatkan perhatian semua stakeholder di desa.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Secara keseluruhan dampak positif dari pelaksanaan program ini sudah dapat dirasakan. Yang mana masyarakat memperoleh rumah layak huni yang awalnya tidak ada menjadi ada. Dampak positif yang dirasakan bahwa masyarakat jadi termotivasi untuk melanjutkan penghidupan.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai Bapak Thobias A. dan Bapak Roby Tilapiru sebagai masyarakat penerima manfaat.

“Apakah hasil yang di capai bermanfaat bagi masyarakat?”

“Hasil program ini sangat dirasakan manfaat oleh kami yang tidak mampu membuat rumah sebaik ini. kami terbelakang, tertinggal, dan secara ekonomi lemah. Kami merasa sangat terbantu dengan program dari

pemerintah Desa Lelang ini, terima kasih”.
(Wawancara tanggal 4 Februari 2022).

“Menurut saya pribadi (Bapak Roby), awalnya tidak terpikirkan bisa punya rumah yang sebaik ini, terbuat dari beton jika di bandingkan dengan rumah saya yang lama terbuat dari papan dan daun kelapa, kalau hujan pasti bocor dan kalau angin bisa terbawah semua atap rumah”. (Wawancara tanggal 4 Februari 2022).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa program rumah bagi masyarakat kurang mampu atau miskin sangat bermanfaat bagi masyarakat yang secara latar belakang masih tertinggal, ekonomi lemah dan terbelakang.

Disisi lain awalnya masyarakat tidak menyangka bisa memperoleh rumah sebaik yang tertera dalam program jika di bandingkan dengan rumah lama yang terbuat dari papan dan daun kelapa, rumah dari program pemerintah desa sangat baik dan kokoh karena terbuat dari beton.

Berikut wawancara dengan Kaur Umum, Bapak Onisias Kay.

“Apakah hasil yang dicapai bermanfaat bagi masyarakat?”.

“Hasil program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa yang kurang mampu di desa Lelang ini, dan tepat sasaran program ini. Saya sendiri merasa senang dengan respons masyarakat yang luar biasa baik terhadap program rumah untuk keluarga kurang mampu atau miskin”.
(Wawancara tanggal 4 Februari 2022).

Hasil wawancara di atas, sangat bermanfaat bagi masyarakat dan program tersebut telah dianggap tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat sangat senang dengan kehadiran program yang dimaksud.

6. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program rumah untuk masyarakat kurang mampu di Desa Lelang terdapat faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program pembangunan rumah tersebut. Faktor penghambat tersebut diantaranya :

- a) Ketersediaan bahan bangunan yang seperti semen, besi, dan seng atap rumah yang harus di beli di kota/kabupaten yang jarak tempuh antar pulau melewati rintangan gelombang dengan waktu perjalanan selama 2 hari.
- b) Mahalnya bahan baku seperti semen, besi, dan seng untuk pembuatan rumah bagi keluarga kurang mampu di Desa Lelang. Kenyataan di lapangan anggaran yang disiapkan untuk pembuatan rumah bagi masyarakat kurang mampu harus memikirkan ketersediaan bahan dan melonjaknya harga bahan bangunan.
- c) Ketidaktepatan waktu pengerjaan rumah yang seharusnya 90 hari kerja menjadi 120 hari kerja dan hal tersebut masih ada beberapa rumah yang belum selesai pengerjaan dan serah terima kunci oleh pemerintah desa kepada masyarakat penerima manfaat.
- d) Kurangnya pengawasan pekerjaan menjadi faktor penghambat lain yang mengakibatkan pekerja tidak mengerjakan rumah sesuai dengan spesifikasi dan standart yang telah ditentukan.

7. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program rumah untuk keluarga kurang mampu di Desa Lelang diantaranya :

- a) Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat baik. Baik bagi pemerintah desa, unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh agama, dan unsur tokoh pemuda dengan antusias saling membantu baik masyarakat yang mendapatkan program rumah serta masyarakat yang tidak mendapatkan bantaun rumah.
- b) Bahan bangunan seperti pasir dan batu bisa didapatkan di Desa Lelang dengan harga yang terjangkau.
- c) Faktor lain adalah masyarakat antusias dengan program rumah bagi keluarga kurang mampu karena dalam periode kepala desa sebelumnya tidak ada

program rumah untuk masyarakat kurang mampu.

adanya evaluasi tiap tahun terhadap pelaksanaan program tersebut

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Efektivitas

Sesuai dengan program kerja Pemerintah Desa Lelang sejak tahun 2018-2021 target keluarga sasaran penerima manfaat rumah untuk keluarga miskin telah tercapai dan berjalan sesuai harapan pemerintah desa. Di sisi lain program rumah untuk masyarakat kutang mampu atau miskin di Desa Lelang mendapatkan dukungan dari berbagai unsur seperti unsur masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

2. Kecukupan

Target sasaran program telah tercapai dan program rumah untuk masyarakat kurang mampu atau miskin telah memecahkan persoalan yang terjadi di Desa Lelang. Selama ini, masyarakat yang memperoleh program adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sangat menyentuh.

3. Pemerataan

Program rumah untuk keluarga kurang mampu atau miskin di Desa Lelang telah berjalan sesuai dengan harapan seluruh elemen masyarakat. Pelibatan berbagai marga atau tetua adat desa menentukan keluarga penerima program dari berbagai marga dan juga pelibatan tim internal dan eksternal pemerintah desa untuk pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program.

4. Responsivitas

Secara umum masyarakat puas dengan program rumah untuk keluarga kurang mampu atau miskin di Desa Lelang walaupun masyarakat ada yang menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan program rumah. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran desa dan dana desa yang digunakan hanya ditujukan untuk program beberapa rumah saja. Berdasarkan pernyataan tersebut, kepuasan masyarakat akan kebijakan pemerintah desa Lelang ditujukan karena

5. Ketepatan

Program rumah bagi masyarakat kurang mampu atau miskin sangat bermanfaat bagi masyarakat yang secara latar belakang masih tertinggal, ekonomi lemah, dan terbelakang. Di sisi lain awalnya masyarakat tidak menyangka bisa memperoleh rumah sebaik yang tertera dalam program jika di dibandingkan dengan rumah lama yang terbuat dari papan dan daun kelapa, rumah dari program pemerintah desa sangat baik dan kokoh karena terbuat dari beton.

F. REFERENSI

- Abidin, Said, & Zainal. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas. Jakarta: 2006.
- Abdul Wahab & Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agustino, Leo. *Politik dan Kebijakan Publik*. APII Bandung – Puslit KP2W Lemlit Universitas Padjajaran. Bandung: 2006.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Kelima. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020.
- Budi, Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dunn & William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Penyunting Muhadjir Darwin)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- John, Moleong, & Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Jones & Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Alih Bahasa Nasir Budiman. Jakarta : Penerbit Rajawali.
- Keputusan Menteri Kimpraswil No 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat dan Kepmen Kimpraswil No 24 /KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Rumah Sehat Sederhana dengan Fasilitas Subsidi.
- Keputusan Kepala Desa Lelang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Patton.
- Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Winarno & Budi. 2002. *Teori dan Proses: Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.